



Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana

INFO PENULIS

Joko Tri Brata
Universitas Sulawesi Tenggara
joko_tribrata@yahoo.co.id
+6281245629964

Sitti Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
StJawiah@yahoo.com

Darlis
Fisip Unsultra
Darlisospol@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 1, April 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Brata, J. T., Jawiah, S., & Darlis. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 135-144

Abstrak

Keberadaan masyarakat untuk membangkitkan partisipasi, sangat ditentukan oleh kearifan, keuletan dan kualitas dari anggota masyarakat dengan budaya masyarakat dan partisipasi menjadi kata kunci dalam pembangunan, Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dengan Tujuan Khusus penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi masyarakat dari aspek ; (1) perencanaan, (2) aspek pelaksanaan pembangunan; dan (3) aspek Pengawasan pelaksanaan pembangunan. Metode Penelitian adalah dengan desain penelitian kualitatif menggunakan partisipan secara acak kepada mereka yang memneuhi kriteria sudah bermukim diatas 20 tahun, penggunaan metode observasi dan wawancara, sementara itu teknik analisa data dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perencanaan yang partisipatif selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik Keterlibatan masyarakat Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, terlihat dari kegiatan Perencanaan yang mereka ikuti, kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan serta kegiatan dalam pengawasan pembangunan. Melihat dampak penting dan positif dari partisipatif masyarakat, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat membangun rasa memiliki yang kuat antar masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada, dimana pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) peningkatan kapasitas, (2) partisipasi dalam pengumpulan informasi, dan (3) partisipasi usulan alternatif kepada pemerintah tingkat atasnya dalam hal perencanaan, bantuan masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan peneguhan hak dan kewajiban sesuai regulasi yang ada dalam Undang Undang Desa.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan, pengawasan

Abstract

The existence of the community to generate participation, is largely determined by the wisdom, tenacity and quality of community members with community culture and participation being keywords in development. The general objective of the study is to describe the form of community participation in the implementation of development in Waemputang Village, South Poleang District, Bombanan Regency with the Specific Objective of the research is to describe community participation from aspects of; (1) planning, (2) aspects of development implementation; and (3) aspects of supervision of development implementation. Research Method is a qualitative research design using participants randomly to those who meet the criteria of having lived over 20 years, using observation and interview methods, while data analysis techniques with triangulation. The results showed that participatory planning has not only become a keyword in development, but also one of the characteristics of good government administration. The involvement of the people of Waemputang Village, South Poleang District, Bombana Regency, can be seen from the planning activities they participate in, activities in the implementation of development and activities in supervising development. See the important and positive impact of participatory. Seeing the important and positive impact of community participation, namely community participation, it is hoped that it can build a strong sense of belonging between communities towards the results of existing development, where basically the community can be actively involved from the early stages of planning preparation. Community involvement can be in the form of: (1) capacity building, (2) participation in information collection, and (3) participation in alternative proposals to the upper level government in terms of planning, community support in the form of money and energy in development implementation activities and activities to strengthen rights and obligations in accordance with regulations in the Village Law.

Keywords: community participation, Planning, supervision

A. Pendahuluan

Diera pembangunan sekarang ini keberadaan masyarakat yang tangguh diharapkan mampu memberikan ilham, dorongan serta arah kepada anggota masyarakat lain, sekaligus pula sanggup menjadi teladan yang menarik bagi masyarakat. Demikian halnya untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat desa, sangat ditentukan oleh kearifan, keuletan dan kualitas dari anggota masyarakat yang dimiliki menggerakkan orang lain agar dapat bekerja secara sadar dengan mempergunakan budaya sesuai perkembangan masyarakat tersebut.

Guna kesinambungan pembangunan desa, maka peranan masyarakat tidak bisa diabaikan karena keberhasilan suatu pembangunan utamanya pembangunan masyarakat desa bukan hanya ditentukan oleh peranan dari kalangan pemimpin dalam hal ini pemerintah, akan tetapi juga ditentukan oleh peranan masyarakat, termasuk pemimpin informal dalam kedudukannya yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami pula aspirasi dan keinginan masyarakat. Dengan demikian tokoh masyarakat dapat menjembatani untuk mempengaruhi anggota kelompok atau warga masyarakat dan memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan masyarakat desa. Dalam kaitan dengan pembangunan, disebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

Dalam kaitan dengan pembangunan desa, bentuk partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

B. Metodologi

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang didasari oleh penggunaan penalaran induktif dan percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).

2. Partisipan

Masyarakat secara sengaja dipilih secara acak, dengan kriteria: (1) masyarakat Desa Waemputang yang bermukim diatas 20 tahun karena dimanknai sangat faham akan kondisi lokasi penelitian; (2) aparat desa yang menjadi informan tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembangunan desa, serta keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan akan pelaksanaan pembangunan. Adapun teknik wawancara untuk menggali informasi tentang bagaimana implmentasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan desa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons masyarakat dalam kegiatan perencanaan Selanjutnya menyajikan data dari hasil pengelompokan sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi setelah data disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan terletak di Kabupaten Bombana dengan luas wilayah 69,40 km² dan memiliki lima dusun yaitu dusun pajjongang dengan luas wilayah 15,12 km², dusun tanjung bainang dengan luas wilayah 14,7 km², dusun kampung baru dengan luas wilayah 14,6 km², dusun bajo dengan luas wilayah 13,9 km² dan dusun maccimpolong dengan luas wilayah 13,6 km².

Desa waemputang memiliki batas wilayah yang sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalibaru, sebelah barat berbatasan dengan Garis Pantai Nelayan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Laea dan sebelah Selatan berbatasan dengan garis Pantai Nelayan atau Selat kabaena.

Tabel 1 ; Nama Dusun, Luas Wilayah serta Jumlah KK

No	Nama Dusun	Luas Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
				L	P
1	Pajjongang	15,12 km ²	136	224	250
2	Kampung Baru	14,6 km ²	141	238	251
3	Tanjung Bainang	14,7 km ²	71	140	115
4	Bajo	13,9 km ²	79	125	140
5	Maccimpolong	13,6 km ²	189	298	353
Jumlah		69,40 km ²	797	1.025	1.109

Sumber Data : Kantor Desa Waemputang

Dalam konteks dengan penharaiian sehari hari masyarakat, masyarakat Desa Waemputang dikenal sebagai Masyarakat yang memiliki sumber pendapatan dan hampir semua masyarakat bekerja secara merangkap, artinya bahwa ada Masyarakat yang bekerja sebagai peternak tetapi dia juga bekerja sebagai nelayan, ada juga Masyarakat yang bekerja sebagai petani tetapi juga bekerja sebagai nelayan, ada Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tetapi dia juga bekerja sebagai peternak dan petani serta perkantoran, dan juga ada yang bekerja sebagai perkantoran tetapi dia juga bekerja sebagai nelayan, peternak dan petani atau pengusaha, dan sumua jenis pekerjaan lainnya. Sehingga untuk menentukan atau mengelompokkan jenis mata pencaharian masyarakat Desa Waemputang sangat sulit karena kebanyakan Masyarakat memiliki banyak sumber

mata pencaharian dalam satu kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Tetapi secara keseluruhan mata pencaharian yang paling menonjol pada Masyarakat Desa Waemputang yaitu petani, peternak, nelayan, perkantoran dan pengusaha. Kelima sumber mata pencaharian tersebut merupakan sumber mata pencaharian pokok pada Masyarakat desa waemputang.

2. Pembahasan

Temuan penelitian berkaitan dengan (1) Fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan, dimana salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat local yang berkembang dimasyarakat.

Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap saat dan paling kurang satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam Desa Waemputang, dimana dapat dicontohkan bahwa melalui mekanisme Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas dalam berbagai tingkatan tentunya dengan skala prioritas yang sesuai tingkatannya.

kedua yaitu masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, maka dibutuhkan kerja keras Kepala Desa dalam mengupayakan kerja sama serta memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang tentunya akan berbuah dukungan dari warga. Masyarakat dipersepsikan turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hubungan yang baik antara Kepala desa dan masyarakatnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryadi dan Bratakusumah (2003) bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut membutuhkan upaya profesional atas data dan fakta sehingga keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disimpulkan bahwa untuk beberapa tema atau rencana pembangunan, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti dalam beberapa kesempatan, masyarakat belum merasakan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil aparat desa

yang ada di Desa Waemputang yang memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa seperti halnya dengan wilayah lain, bahwa musrenbang tingkat Kecamatan antara Februari-Maret yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan desa. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Muswayah Perencanaan yang ada di Desa.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

Temuan penelitian berdasarkan pengawasan pelaksanaan pembangunan, maka diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pengawasan masyarakat kepada pelaksanaan pembangunan desa dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara terlembaga, seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi dan demonstrasi damai. Sedangkan pengawasan yang tidak melembaga, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet-pamflet yang tidak sopan, cacik maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan.

Secara umum bentuk Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan di Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan, juga sama dengan daerah lain, dimana di rujuk dan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak :

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada paragraf 3 pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa, dijelaskan bahwa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkan dalam musyawarah Desa paling sedikit satu tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

2.1. Partisipasi dalam Perencanaan

Untuk Desa Waemputang, musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Walaupun sudah rutin dilakukan, namun dalam kenyataannya musrenbang Desa Waemputang, belum dilakukan optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan Desa Waemputang. Walaupun pandangan dari aparat desa Waemputang menyatakan bahwa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat, yang dari setiap perwakilan desa itu ada 4 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, Tokoh masyarakat, dan PKK, dan nara sumber dari Kantor Kecamatan. (Wawancara tanggal 9 April 2024),

Kalau hal tersebut di ajukan kepada masyarakat yang tidak mengikuti Musrembang, maka diperoleh informasi bahwa proses perencanaan pembangunan, melalui Musrembang, adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh masyarakat, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tataran masyarakat hanya terbatas musyawarah (temu para tokoh masyarakat) dalam Desa Waemputang dan juga terkadang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dalam pertemuanyang kecil. Hal ini sehingga dikatakan oleh yang tidak berpartisipasi bahwa banyak usulan dan keinginan mereka yang yang hilang di tengah jalan bahkan banyak yang tidak terakomodir oleh model perencanaan yang ada. (Wawancara tanggal 12 April 2024)

Dalam pengamatan peneliti, bahwa kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan baik perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari Dana Desa dan bahkan Program Alokasi Dana Desa yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten.

Temuan penelitian, juga sesuai apa yang dikemukakan Geddesian (dalam Soemarmo 2005:26) yang menekankan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Waemputang, dengan menekankan pada faktor yang disebutkan antara lain ;

1. Peningkatan kapasitas dan sumberdaya masyarakat
Peningkatan kapasitas ini, dapat melalui Pendidikan ataupun pelatihan untuk masyarakat Desa Waemputang, baik mengenai perencanaan pembangunan maupun kegiatan lain. Hal ini berdampak pada kemampuan para tokoh yang ikut pelatihan untuk mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas.
2. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi
Dalam hal pengumpulan informasi, temuan penelitian belum dilaksanakan secara menyeluruh di Desa Waemputang, hanya sebagian kecil tokoh yang mapu melakukannya, sehingga perlu dilakukan keterbukaan akan informasi informasi secara kontinyu (terus menerus) baik itu infirmasi formal maupun informasi pelengkap yang akan dipakai pada saat dilakukan perencanaan.
3. Partisipasi dalam memberikan alternatif usulan kepada Pemerintah diatasnya.
sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah, meskipun alternative rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan, prinsip dasar di atas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan.

2.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan perencanaan. Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program termasuk penilaian kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan.

a. Sumbangan Materi

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Desa Waemputang dalam bentuk sumbangan materi adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan untuk pembangunan.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman pada tanggal 18 april 2024 di kantor Desa Waemputang, ketika ditanyakan mengenai bentuk sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengatakan bahwa:

"Tidak, biasanya tenaga saja yang diberikan langsung dari masyarakat sekitar".

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sejalan dengan pendapat diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Aswan S.H selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa di kantor Desa Waemputang pada wawancara tanggal 18 April 2024, yang mengatakan bahwa:

"Partisipasi yang terbesar adalah partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dan dilanjutkan oleh partisipasi dalam bentuk tenaga". Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain adalah partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, dan partisipasi dalam bentuk tenaga.

Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, pada wawancara tanggal 18 April 2024 di kantor Desa Waemputang, beliau menambahkan:

"Jika ada pembangunan yang dilakukan terkadang saya turut terlibat langsung kadang juga tidak, salah satu pembangunan yang hadir dan terlibat langsung ialah pembangunan jalan tani".

Dari hasil wawancara bahwa kepala Desa turut andil dalam pembangunan salah satunya pembangunan jalan tani.

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada masyarakat Desa Waemputang, apakah bentuk sumbangan tenaga saja yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Waemputang. Bapak Sudirman salah satu masyarakat saat kami wawancarai pada tanggal 19 April 2024 menegaskan bahwa:

"Dalam diskusi pembangunan juga kami biasanya menyampaikan bahwa masyarakat ingin berpartisipasi untuk pembangunan dan dapat membantu dalam bentuk tenaga". Dari hasil wawancara tersebut bahwa salah satu masyarakat Desa waemputang membenarkan partisipasi dalam bentuk tenaga.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Darwis selaku Sekretaris Desa Waemputang di kantor Desa waemputang pada tanggal 18 April 2024, saat ditanya mengenai pertanyaan yakni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan apakah terlibat secara langsung, beliau mengatakan bahwa: "

Iya tentu masyarakat disini terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan".

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Bapak Sudirman salah satu Perwakilan Masyarakat dan Kelompok Tani Desa Waemputang saat wawancara pada tanggal 19 April 2024, menambahkan ;

Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Waemputang dari bentuk fisik partisipasi masyarakat sudah menunjukkan keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari bentuk partisipasi tenaganya dari kegiatan gotong royong untuk pembangunan, ini tidak luput dari peranan RT, RW dan Kepala Dusun.

Alasan informan memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Sudirman saat wawancara pada tanggal 19 April 2024 mengenai bagaimanakah bentuk sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan beliau menggambarkan bahwa:

Alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong, tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja.

Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat Desa Waemputang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Keterlibatan Sebagai Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

Bapak Aswan selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa pada wawancara tanggal 18 April 2024 di kantor Desa Waemputang, mengenai sejauh apa keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, beliau mengatakan:

Aktif semua dan jika diakan Musrenbang maka semua perwakilan baik dari Anggota DPRD, Dinas Kesehatan, Sekolah, Pertanian, dan tentunya Camat menyempatkan waktu dalam menghadiri pertemuan. Semua pemerintahan yang ada disesa ini hadir pada saat Musrenbang berlangsung.

Keikutsertaan masyarakat dan undangan yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Darwis selaku Sekertaris Desa Waemputang pada tanggal 18 April 2024 terkait pertanyaan yang sama bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan, beliau menjelaskan:

Pembangunan fisik di Desa Waemputang sudah mulai berjalan setelah pemerintah memberikan bantuan dana untuk desa. Sarana prasarana yang dibangun berguna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat Desa Waemputang dirasa cukup baik dan juga tingkat partisipasi dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan terwujud dengan baik.

2.3. Partisipasi dalam Pengawasan

Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini untuk menggerakkan partisipasi masyarakat itu perlu adanya motivasi yang bersifat kekeluargaan, informasi yang terbuka kepada masyarakat serta memberikan keteladanan yang tampak dan dapat di rasakan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam pembangunan dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berjalan dengan baik, karena masyarakat yang ikut aktif dalam pembangunan dapat membantu pengawasan pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model paduan penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Konsep ini di landasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpuh pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan memutuskan pembangunan yang ada di desa, hal itu tidak akan berjalan dengan baik.

Bentuk pengawasan masyarakat kepada pelaksanaan pembangunan desa dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara terlembaga, seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi dan demonstrasi damai. Sedangkan pengawasan yang tidak melembaga, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet-pamflet yang tidak sopan, cacik maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan.

Hasil simpulan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Desa Waemputang, sudah cukup baik dan berjalan sesuai keadaan desa. Walaupun tidak sama dengan harapan umum, tetapi bentuk partisipasi sudah terlihat dan masih membutuhkan pendalaman dan bahkan peningkatan/

D. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan yang partisipatif selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*"

Keterlibatan masyarakat Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, terlihat dari kegiatan Perencanaan yang mereka ikuti, kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan serta kegiatan dalam pengawasan pembangunan.

Melihat dampak penting dan positif dari partisipatif masyarakat, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat membangun rasa memiliki yang kuat antar masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada, dimana pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat

dapat berupa: (1) peningkatan kapasitas, (2) partisipasi dalam pengumpulan informasi, dan (3) partisipasi usulan alternatif kepada pemerintah tingkat atasnya dalam hal perencanaan, bantuan masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan peneguhan hak dan kewajiban sesuai regulasi yang ada dalam Undang Undang Desa.

E. Referensi

- Abe, A. (2002). *“Perencanaan Daerah Partisipatif”*. Solo: Pondok Edukasi Bob, Sugeng Hadiwinata. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Brata, J. T, dkk, (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan”. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 2 (1), April 2022 (halaman 37-46)., ISSN: 2808-1307 <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>©
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Conyers, D., & Hills, P. (1992). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan sons. New york Hasibuan,
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Milles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. UI Percetakan, Jakarta. Patton, Adri. 2005
- Riyadi & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Royat, S. (2008). *Sistem Pengelolaan Informasi*, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Jakarta
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: dengan pokok bahasan khusus perencanaan pembangunan daerah*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soemarmo. (2005). Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), *Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sumarto, Sudarno, Usman, S., & Mawardi, S. (1997) *‘Agriculture’s Role in Poverty Reduction: Bringing Farmers to the Policy Fomulation Process’ [Peran Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan: Melibatkan Petani ke dalam Proses Perumusan Kebijakan]*. *Agriculture Sector Strategy Review*. Jakarta: Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia
- Tjokroamidjojo. (1989). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung. Tjokrowinoto, Tjokrowinoto, M. (1999). *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Todaro, Michael, & Todaro. (1977). *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.